
BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah merupakan kerangka implementatif atas pelaksanaan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2013, dan juga sebagai proyeksi pada tahun 2013 dengan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun-tahun sebelumnya serta kondisi umum perekonomian tingkat nasional dan perekonomian tingkat Provinsi Bali.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2013 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2011, perkiraannya pada tahun 2012, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2013, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2013 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan perkiraannya pada tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemajuan tersebut antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabilitas yang terjaga. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010 (6,2 persen). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh.

Pada tahun 2011, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi masyarakat dan ekspor barang dan jasa meningkat masing-masing sebesar 8,8 persen, 4,7 persen, dan 13,6 persen. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 6,5 persen didukung oleh permintaan domestik yang lebih baik dengan resiko eksternal dan tingginya harga energi.

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga dalam menghadapi tekanan berat ekonomi dunia berupa melambatnya perekonomian dunia, berlanjutnya krisis keuangan Eropa, gangguan cuaca dan iklim, serta ketegangan politik di Timur Tengah dan Iran.

Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2011, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 29,9 juta orang (12,4 persen) atau berkurang sebesar 100 ribu orang dibandingkan Maret 2011. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,7 juta orang (6,6 persen) atau berkurang sebesar 600 ribu orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan awal tahun 2012, kondisi ekonomi global belum membaik dengan krisis utang Eropa yang masih rentan dan perlambatan ekonomi negara-negara maju dan *emerging market*. Krisis yang dialami

negara-negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi sehingga meningkatkan ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan. Perdagangan global yang menurun berdampak pada penurunan ekonomi negara-negara *emerging market*. Sejalan dengan aktivitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun, yang mendorong penurunan tekanan inflasi global.

Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2012, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah tidak membaik, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2008-2013. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2013 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan propinsi tahun 2013. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2013 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah.
- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana

penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

Struktur ekonomi Klungkung jika dikaitkan dengan target kontribusi sektor yang ditetapkan mengalami penyimpangan, dimana capaian kontribusi sektor adalah 45,07% untuk sektor tersier dari target 42,77%, diikuti sektor primer sebesar 36,55% dari target 39,08%, sedangkan komposisi sektor sekunder sebesar 18,37% melebihi dari target 18,16%. Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah Klungkung, diupayakan peranan sektor primer dan sekunder lebih ditingkatkan untuk memperkuat daya handal perekonomian daerah. Strategi ini perlu dimantapkan dalam upaya menjaga pertumbuhan industri pariwisata yang rentan terhadap dampak berbagai isu baik lokal, regional dan internasional.

Tingkat inflasi di Bali umumnya pada tahun 2011 mencapai 9,62% jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 5±1%. Angka ini lebih tinggi juga jika dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2010 sebesar 5,91%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: bergejolaknya harga pangan dunia seperti susu dan kedelai, berfluktuasi harga minyak dunia sehingga mendorong kenaikan BBM di dalam negeri dan masih lemahnya kontrol distribusi barang yang keluar-masuk daerah Bali.

Proyeksi Makro Ekonomi Tahun 2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi yang telah ditetapkan dan berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka proyeksi makro ekonomi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Klungkung pada tahun 2012 ditetapkan pada kisaran 6,11% dan pada tahun 2013 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung diproyeksikan sebesar 6,93%. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi dan ekspor perlu ditingkatkan, dan tidak terlalu didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Klungkung tahun 2012 ditetapkan pada kisaran Rp. 3.430.180.000 dan pada tahun 2013 PDRB Per Kapita sebesar Rp. 22.680.000 per tahun. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil.

Struktur Ekonomi

Berdasarkan kajian Tim Makro Ekonomi Provinsi Bali, bahwasanya pada tahun 2013 nanti struktur perekonomian Kabupaten Klungkung masih sangat bertumpu pada sektor tersier dengan kontribusi sebesar 45,83%, sektor primer memberikan kontribusi 33,08% dan sektor sekunder sebesar 21,09%.

Inflasi

Pada tahun 2013 nanti, untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflasi perlu dikendalikan untuk menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Proyeksi inflasi adalah sekitar 6,47% lebih tinggi dari pada proyeksi inflasi pada tahun 2012 yang berkisar 5,37%.

Investasi

Jumlah investasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi cukup besar dan Kabupaten Klungkung masih menggantungkan investasi pemerintah pusat dan provinsi karena pada dasarnya investasi swasta dan rumah tangga sangat kurang. Pada tahun 2013 nanti, Pemerintah Kabupaten Klungkung tetap berupaya meningkatkan investasi dari pihak swasta terutama dalam rangka pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pada tahun 2013 jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara ditargetkan sejumlah 176.234 wisatawan baik domestik maupun manca Negara, jumlah ini meningkat dari tahun 2012 yang ditargetkan sejumlah 160.234 orang dengan asumsi bahwa tingkat keamanan yang semakin kondusif serta komitmen pemerintah dan masyarakat Bali umumnya dan Klungkung khususnya yang tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 70,74 lebih kecil dari yang dicantumkan oleh Provinsi Bali, dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kabupaten Klungkung mendekati dengan Provinsi Bali pada Tahun 2013 nanti.

Kondisi perekonomian Klungkung tahun 2012 dan 2013 diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Perkembangan industri pariwisata.
- c. Jumlah nilai produksi dan ekspor.
- d. Peranan sektor primer dan sekunder.

- e. Investasi baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat.
- f. Perkembangan ekonomi global.

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

1. Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2. Menjaga Stabilitas Ekonomi.
Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3. Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.
Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2013 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2013, yakni “Memperkuat Potensi Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2013 diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan serta bebas biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Disamping itu diupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan sektor – sektor unggulan daerah dalam penyediaan kesempatan kerja.

Peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan regulasi di bidang perijinan dan adanya kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasar regional, nasional dan internasional.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

3.2.2 Dana Perimbangan, Desentralisasi/APBD

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

serta antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan nilainya menggunakan formula penghitungan masing-masing. Pendelegasian tugas pada pemerintah daerah yang semakin besar dalam era desentralisasi berimplikasi pada peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Untuk ini, peningkatan alokasi dana transfer perlu disertai peningkatan kualitas pengelolaan dan pengeluarannya. Langkah peningkatan kualitas tersebut antara lain melalui penyempurnaan formula penghitungan, akurasi waktu distribusi dana, peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan peningkatan kualitas belanja daerah. Selain peningkatan kualitas, juga untuk mendorong sinergi antara perencanaan anggaran pusat dan daerah, sesuai arahan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rancangan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Bappenas dan Kementerian Keuangan (SEB No.0142/M.PPN/06/2009). Dalam hal ini yang dimaksud adalah perlunya meningkatkan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dalam semua dokumen perencanaan dan penganggaran. Kualitas pengeluaran dapat dicapai dengan menjaga konsistensi antara prioritas dan alokasi anggarannya serta efektivitas penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

1. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi :
 - a. Pendapatan pajak daerah
 - b. Pendapatan retribusi daerah
 - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Sedangkan pendapatan transfer, meliputi :
 - a. Dana perimbangan, yang terdiri dari :
 - a.1. Dana Bagi Hasil Pajak
 - a.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam)
 - a.3. Dana Alokasi Umum
 - a.4. Dana Alokasi Khusus
 - b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya, terdiri dari :
 - b.1. Dana Otonomi Khusus
 - b.2. Dana Penyesuaian
3. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Pendapatan lainnya.

3.2.3 Dana Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

Dana Tugas Pembantuan dan UB adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

Dana Tugas Pembantuan (TP) dan UB untuk Kabupaten Klungkung pada tahun 2012 sebesar Rp. 9.392.048.000,00. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama yang diterima oleh beberapa satuan kerja, yaitu :

1. Kementerian Pertanian untuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp. 1.078.300.000,00

2. Kementerian Kesehatan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 820.650.000,00
3. Kementerian Pekerjaan Umum untuk Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 2.327.500.000,00
4. Kementerian Pertanian Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp. 1.006.300.000,00
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 781.875.000,00
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 1.175.000.000,00
7. Kementerian Dalam Negeri untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.202.423.000,00

Kebijakan di bidang keuangan daerah pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Perda Provinsi Bali), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan;

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan Daerah, meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula Dana Alokasi Umum. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

Selain dana dari pendapatan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Klungkung. Sedangkan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klungkung yang memberikan kontribusi dalam pembangunan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja; dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut **fungsi** yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja menurut kelompok belanja, terdiri atas :

1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

-
- 2) **Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

c. Pembiayaan

- 1) Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan, yang meliputi Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal daerah, Pembayaran utang pokok, Pemberian pinjaman daerah.
- 3) Pembiayaan neto, merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang jumlahnya harus dapat menutup defisit anggaran.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai , Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana”

Yang dimaksud dengan Masyarakat Klungkung yang Sejahtera, Aman, Damai, Bermartabat, Bermoral dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masyarakat Klungkung yang sejahtera, yaitu menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin.
2. Masyarakat Klungkung yang Aman, yaitu masyarakat Klungkung yang teratur secara sekala niskala serta terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana. Seperti : terorisme dan anarkhisme.
3. Masyarakat Klungkung yang Damai, yaitu masyarakat Klungkung yang diselimuti atmosfer kesejukan lahir dan batin, baik di desa maupun perkotaan yang ditunjukkan dengan suasana bryak-bryuk, pekedek pekenyem. Hal ini merupakan indikator optimisme masyarakat menatap masa depan.
4. Masyarakat Klungkung yang Bermartabat, yaitu masyarakat Klungkung yang disegani dan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Masyarakat Klungkung yang bermoral, yaitu masyarakat Klungkung yang dalam berpikir, bertutur-kata, dan bertingkah laku yang sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.
6. Masyarakat klungkung yang Berbudaya, yaitu masyarakat Klungkung yang mampu secara konsisten mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah dan Nasional, serta secara cerdas berkeaktivitas dan berinovasi serta mengadopsi nilai-nilai positif budaya baru, yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung, perlu ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah melalui pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan minat investasi sektor usaha riil, pertanian perkebunan, kehutanan, perikanan-kelautan, peternakan, industri perdagangan dan koperasi.
2. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan kesehatan guna terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat, profesionalisme di bidang pelayanan guna peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Klungkung yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah
4. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah melalui penumbuhan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahaman masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/ arkeologi dan pengembangan kreativitas seni kontemporer /klasik/sakral/propan.
5. Menunjukkan bakti yoga dan jnana marga serta dana punia dalam kehidupan keagamaan melalui peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia; peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Agama; pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra; dan menciptakan rasa **menyamabraya** yang damai (**Shanti**) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.
6. Mewujudkan peningkatan usaha pertanian, industri/kerajinan, pariwisata, usaha kecil dan menengah, koperasi serta kemampuan kewirausahaan masyarakat dengan mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (*empowered*) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tetap berdasar pada upaya pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan; dan meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
7. Mewujudkan peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah yang berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana, yaitu berlandaskan hubungan yang harmonis antara

manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungannya.

8. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
9. Mewujudkan peningkatan stabilitas, ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum dengan menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkatkan persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam memajukan Kabupaten Klungkung.
10. Mewujudkan kebersihan keindahan dan penataan lingkungan pemukiman melalui penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep *Tri Hita Karana*, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari.

4.1.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008 – 2013.

Dalam melaksanakan **Misi pertama “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan”**, ditetapkan 3 (tiga) sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Daerah
Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.
2. Peningkatan Daya Saing Daerah
Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatkan Daya Saing Daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
3. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang

berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan adalah penghijauan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Dalam pelaksanaan **Misi ke-dua :”Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu:

1. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
2. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat.
3. Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Untuk mencapai **Misi Ke-tiga**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Masyarakat”** ditetapkan beberapa sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tuntas wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.
2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.

Untuk mencapai **Misi Ke-empat**, yaitu **“Mewujudkan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah”** ditetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra serta pengetahuan Sejarah/ arkeologi.
2. Peningkatan kreativitas seni kontemporer /klasik/ sakral/propan dan penghargaan terhadap seniman yang berprestasi.

Untuk mencapai **Misi Ke-lima**, yaitu **“Menunjukkan Bakti Yoga Dan Jnana Marga Serta Dana Punia Dalam Kehidupan Keagamaan”** ditetapkan 4 sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan Jnana Marga serta Dana Punia.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Agama Hindu melalui peningkatan pembinaan umat beragama dan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.
3. Peningkatan kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai sastra.
4. Peningkatan rasa **menyamabraya** yang damai (**Shanti**) di antara sesama umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.

Untuk mencapai **Misi Ke-enam**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian, Industri/Kerajinan, Kepariwisata, Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Serta Kemampuan Kewirausahaan Masyarakat”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
2. Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
3. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Untuk mencapai **Misi Ke-tujuh**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Untuk mencapai **Misi Ke-delapan**, yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik”** ditetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

- 1) Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;

Untuk mencapai **Misi Ke-sembilan**, yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban Dan Penegakan Hukum”** ditetapkan 4 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
3. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah; dan
4. Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM.

Untuk mencapai **Misi Ke-sepuluh** yaitu **“Mewujudkan Kebersihan Keindahan Dan Penataan Lingkungan Pemukiman”** ditetapkan 2 sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang antara lain:

1. Terwujudnya penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh konsep *Tri Hita Karana*, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan lestari
2. Terwujudnya pembangunan perumahan sederhana yang terjangkau oleh masyarakat serta meningkatnya kepemilikan rumah sehat oleh masyarakat miskin.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program Unggulan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang, penuntasan wajib belajar 12 tahun serta beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan gratis, dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD kelas II.
3. Peningkatan pembinaan dan pelestarian adat istiadat, seni dan budaya serta peningkatan bantuan desa pekraman dan subak.
4. Mempercepat pembangunan dermaga Klungkung daratan.
5. Penataan Kantor Bupati.
6. Peningkatan pembangunan pasar Galliran dan pasar Mentigi.
7. Mempercepat pembangunan PPI serta merintis pembangunan dermaga Lembongan.
8. Pembinaan usaha industri kecil dan kerajinan untuk meningkatkan volume ekspor.
9. Penyediaan kredit tanpa agunan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan membuka lapangan kerja serta iklim investasi yang kondusif.
10. Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri kecil yang sinergis.

Berdasarkan program unggulan pada RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 dan arah kebijakan pembangunan, maka visi dan misi pembangunan pada Tahun 2013 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

Prioritas 1 : Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dan kualitas pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang dan penuntasan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

-
- Prioritas 2 :** Peningkatan infrastruktur melalui percepatan pembangunan dermaga klungkung daratan, penataan kantor Bupati Klungkung, peningkatan pembangunan pasar galiran dan memulai rehabilitasi pasar mentigi serta mempercepat pembangunan PPI Kusamba
- Prioritas 3 :** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD Kelas II
- Prioritas 4 :** Penanggulangan kemiskinan
- Prioritas 5 :** Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan
- Prioritas 6 :** Peningkatan kesempatan kerja (membuka peluang investasi dan pengembangan dunia usaha)
- Prioritas 7 :** Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah
- Prioritas 8 :** Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM
- Prioritas 9 :** Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta peningkatan IPTEK
- Prioritas 10:** Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis.

Sasaran Prioritas 1 :

1. Tuntas rintisan wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian beasiswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.
2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui penyediaan sarana dan prasarana yang representative.

Sasaran Prioritas 2 :

1. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan; terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah yang efisien dan efektif.
2. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergis keterpaduan kebijakan dan program pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
4. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Sasaran Prioritas 3 :

1. Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
2. Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.
4. Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada masyarakat.

Sasaran Prioritas 4 :

1. Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial.
2. Meningkatnya peran gender dalam pembangunan
3. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Sasaran Prioritas 5 :

1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
2. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi
3. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah
4. Meningkatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali
5. Meningkatnya kerjasama pengembangan budidaya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian
6. Meningkatnya kerjasama kemitraan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata
7. Berkembangnya kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan
8. Meningkatnya prasarana dan sarana publik yang memadai, ketersediaan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Sasaran Prioritas 6 :

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan
2. Meningkatnya minat investasi dengan menyederhanakan kebijakan dan regulasi
3. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
4. Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.
5. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan energi untuk masyarakat.

Sasaran Prioritas 7 :

1. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama
3. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali
4. Meningkatnya kesadaran akan perbedaan, toleransi dan kerjasama antar umat beragama

5. Meningkatnya keharmonisan hubungan antar masyarakat dan antar kelembagaan tradisional Bali

Sasaran Prioritas 8 :

1. Terwujudnya kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman yang kondusif dalam mendukung pembangunan
2. Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah; dan
5. Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM

Sasaran Prioritas 9 :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
2. Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
6. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Sasaran Prioritas 10 :

1. Terwujudnya swasembada pangan
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam arti luas
3. Tumbuhnya industri kecil dan industri rumah tangga serta mampu bertahan dari krisis ekonomi

Prioritas program dan fokus kegiatan pembangunan yang ditetapkan merupakan penjabaran dari kesepuluh prioritas pembangunan daerah.

Prioritas 1 :

Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dan kualitas pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan, subsidi silang dan rintisan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 1, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pendidikan Anak Usia Dini

- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pengadaan buku-buku dan alat tulis Siswa

Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Sekolah
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren
Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar
Penyediaan Beasiswa Retrieval untuk anak putus Sekolah
Penyediaan Beasiswa transisi
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pendidikan Menengah

Pembangunan gedung sekolah
Pengadaan buku-buku dan alat tulis Siswa
Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan Kepulauan
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pendidikan Non Formal

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pemberian Bantuan operasional pendidikan non formal
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Program Manajemen Pelayanan pendidikan

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Prioritas 2 :

Peningkatan infrastruktur melalui percepatan pembangunan dermaga klungkung daratan, penataan kantor Bupati Klungkung, peningkatan pembangunan pasar galiran dan memulai rehabilitasi pasar mentigi serta mempercepat pembangunan PPI Kusamba

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 2, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Program Pembangunan Jalan dan jembatan.

Perencanaan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

Program Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Rehab. / Pemeliharaan jalan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengendalian Banjir

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Program Pemanfaatan Tata Ruang

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan

Prioritas 3 :

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan penyakit menular serta peningkatan pelayanan kesehatan gratis dari puskesmas hingga rawat inap di RSUD Kelas II

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 3, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Program upaya kesehatan masyarakat

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Kesehatan Ibu dan Anak)

Peningkatan Kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Program perbaikan gizi masyarakat

Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi mikro lainnya
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Program pengembangan lingkungan sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Program pencegahan dan penganggulangan penyakit menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan pencegahan dan penganggulangan penyakit
Peningkatan imunisasi
Peningkatan surveilans dan Penanggulangan wabah

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Pembangunan Puskesmas
Pembangunan Puskesmas Pembantu
pengadaan Puskesmas Keliling
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana puskesmas
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawat-anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan (lansia)

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan Masyarakat
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Rehabilitasi bangunan rumah sakit
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

Program Pemeliharaan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud

Pelayanan dan Pendukung pelayanan

Prioritas 4 :

Penanggulangan kemiskinan

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 4, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

Program Keluarga Berencana

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman

Bedah Rumah

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Program Transmigrasi Regional.

Penyuluhan Transmigrasi Regional

Prioritas 5 :

Pemberdayaan perekonomian wilayah dan ekonomi kerakyatan

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 5, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah

Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerja Sama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi

Program Pengembangan Otonomi Daerah

Pelayanan Perijinan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan ketrampilan industri kerajinan

Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Kluster Industri

Prioritas 6 :

Peningkatan kesempatan kerja (membuka peluang investasi dan pengembangan dunia usaha)

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 6, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Koordinasi perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam penyediaan

Pelayanan publik

Prioritas 7 :

Pemberdayaan dan pengembangan pariwisata, pelestarian kebudayaan daerah

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 7, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pendukung pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Prioritas 8 :

Peningkatan ketentraman, ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dan HAM

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 8, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas

Operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Pembentukan Dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Koordinasi Forum- Forum Diskusi Politik

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Fasilitas Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinasi kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - undangan

Publikasi Peraturan Perundang - undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru

Program Pengembangan Produk Hukum

Peningkatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Prioritas 9 :

Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta peningkatan IPTEK

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 9, maka prioritas program dan fokus kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan logistik
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat Bangunan kantor
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah
Kegiatan Reses
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB
Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi daerah
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Peningkatan Kapasitas dan kustomisasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Seleksi penerimaan calon PNS
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Prioritas 10 :

Meningkatkan pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, dan industri kecil yang sinergis.

Untuk mewujudkan sasaran dari prioritas pembangunan 10, maka prioritas program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Peningkatan kemampuan lembaga petani.

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Penyusunan data base potensi produksi pangan
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
Montoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Pelatihan dan bimbingan pengoprasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pembibitan dan Perawatan Ternak
Pengembangan Agribisnis Peternakan.

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengembangan Hutan Tanamanan
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamana Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kajian OptimalisasiPengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Penjabaran lebih lanjut program prioritas dan fokus kegiatan dari prioritas pembangunan 1 sampai dengan 10, sebagaimana termuat dalam tabel Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013, terlampir.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2013 maka seluruh SKPD hendaknya merencanakan dan melaksanakan program sesuai arah kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, akuntabel, serta partisipatif. Disamping itu dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar bidang dan antar wilayah perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih yang pada akhirnya mengurangi manfaat dari keberhasilan pembangunan. Agar dapat mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi tersebut maka hasil-hasil forum SKPD dan Musrenbang dijadikan acuan utama di dalam penyusunan RKPD.

Dokumen RKPD ini merupakan acuan bagi SKPD Kabupaten Klungkung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013. Kepada dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan dan memberikan kontribusi untuk dapat mewujudkan sasaran dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Klungkung.

RKPD merupakan acuan bagi seluruh SKPD di dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan bagi masyarakat maupun dunia usaha diharapkan dapat menyesuaikan dan memberikan kontribusi, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2013, maka disusun rencana kerja dan pendanaan menurut **urusan wajib dan urusan pilihan** yang dirinci ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, SKPD yang bertanggung jawab, program, serta pagu indikatif per program pembangunan, khususnya yang dialokasikan untuk **Belanja Langsung**.

Program-program serta alokasi pembiayaan berdasarkan pagu indikatif disajikan dalam format sebagaimana tabel terlampir.

Untuk **Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan** yang menyentuh kepentingan masyarakat dialokasikan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, namun usulan program dan penganggarannya dilakukan oleh SKPD *leading sector* yang membidangi. SKPD-SKPD *leading sector* yang membidangi belanja tidak langsung tersebut antara lain :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
8. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
9. Dinas Pekerjaan Umum
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
13. Sekretariat DPRD
14. Inspektorat Daerah
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

16. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat
18. Badan Kepegawaian Daerah
19. Rumah Sakit Umum Daerah
20. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
21. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
22. Kantor Penanaman Modal
23. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
24. Kantor Lingkungan Hidup
25. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
26. Bagian Umum
27. Bagian Kesejahteraan Rakyat
28. Bagian Pembangunan
29. Bagian Perekonomian
30. Bagian Pemerintahan
31. Bagian Hukum, Organisasi dan HAM
32. Bagian Humas dan Protokol
33. Bagian Perlengkapan
34. Kecamatan Dawan
35. Kecamatan Klungkung
36. Kecamatan Banjarangkan
37. Kecamatan Nusa Penida
38. Kelurahan Semarapura Tengah
39. Kelurahan Semarapura Kaja
40. Kelurahan Semarapura Kangin
41. Kelurahan Semarapura Kelod Kangin
42. Kelurahan Semarapura Kelod
43. Kelurahan Semarapura Kauh

BAB VI PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

RKPD Tahun 2013 merupakan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2013 sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.

Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD, setelah menerima pagu sementara Tahun 2013, perlu menyesuaikan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai berikut:

3. RKPD Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013 sebagai berikut:
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2013, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

-
- c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
 - d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN CANDRA